

Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Di Kelurahan Semarang Barat Kota Semarang

Dina Damayanti¹⁾, Rini Werdiningsih²⁾, Nurkholik³⁾, Rekno Sulandjari⁴⁾, Firda Nisafera Ulfa⁵⁾

^{1,3,4,5} Universitas Pandanaran Semarang, Jawa Tengah Indonesia ² Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jawa Tengah Indonesia

Email : dinadsenadi@ymail.com¹⁾, rini-werdi@untagsmg.ac.id²⁾, nurkholik68@gmail.com³⁾, reknosulandjari@unpand.ac.id⁴⁾, firdanisaf06@gmail.com⁵⁾

Abstract: *The community service activities aim to provide institutional facilitation and mentoring through training, managerial development, strengthening organizational structures, and developing business development strategies for cooperatives. The methods used include interactive lectures, Focus Group Discussions (FGDs), Problem-Based Learning, and Annual Member Meeting (RAT) simulations. The results of the activities indicate an increase in the understanding of management and members regarding cooperative governance, business planning, service innovation, and cooperative decision-making mechanisms. This mentoring is expected to be the first step in strengthening the Merah Putih Village Cooperative (KKMP) so that it can develop into a healthy, accountable cooperative that contributes to the welfare of the West Semarang Village community.*

Abstrak : *Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan kelembagaan melalui pelatihan, pembinaan manajerial, penguatan struktur organisasi, serta penyusunan strategi pengembangan usaha bagi koperasi. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, Focus Group Discussion (FGD), Problem Based Learning, serta simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus dan anggota mengenai tata kelola koperasi, penyusunan perencanaan usaha, inovasi layanan, serta mekanisme pengambilan keputusan koperasi. Pendampingan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) agar dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, akuntabel, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Kelurahan Semarang Barat*

Keyword : *Fasilitasi, Pendampingan, Kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berbasis komunitas merupakan salah satu pendekatan strategis dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi melalui penguatan kelembagaan lokal, peningkatan partisipasi, serta pengelolaan sumber daya ekonomi secara kolektif dan berkelanjutan. Dalam konteks perekonomian nasional Indonesia, koperasi memiliki posisi yang sangat strategis karena secara konstitusional diakui sebagai sokoguru perekonomian nasional yang mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Koperasi tidak hanya dipahami sebagai badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai lembaga sosial-ekonomi yang menekankan asas kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Melalui mekanisme keanggotaan yang bersifat sukarela dan pengelolaan yang demokratis, koperasi diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi (Johnston Birchall, 2011). Oleh karena itu, penguatan koperasi, khususnya di tingkat desa dan kelurahan, menjadi agenda penting dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perkembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan manajerial. Banyak koperasi yang dibentuk secara administratif belum mampu beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Permasalahan yang umum dijumpai meliputi lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengurus, sistem administrasi keanggotaan yang belum tertata, akuntabilitas keuangan yang lemah, serta rendahnya literasi koperasi di kalangan anggota (Wardana et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan koperasi sulit berkembang dan belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi anggotanya maupun masyarakat sekitar.

Selain permasalahan internal, koperasi di tingkat lokal juga menghadapi tantangan eksternal berupa keterbatasan akses permodalan, minimnya jejaring kemitraan, serta rendahnya kemampuan dalam mengembangkan unit usaha yang adaptif terhadap kebutuhan pasar. Tanpa adanya pendampingan dan fasilitasi yang memadai, koperasi berisiko menjadi lembaga formal yang pasif dan tidak berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi masyarakat (Suryaningrum et al., 2024). Oleh karena itu, pembentukan koperasi perlu diiringi dengan upaya penguatan kelembagaan yang sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih mendorong pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan inklusi keuangan, memperpendek rantai distribusi, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Program Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi simbol kebijakan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang produktif dan berkelanjutan (Hutapea et al., 2024).

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat, Kota Semarang, merupakan salah satu koperasi yang dibentuk dalam kerangka implementasi kebijakan tersebut. Sebagai koperasi yang relatif baru, KKMP memiliki potensi besar untuk menjadi wadah partisipasi ekonomi masyarakat kelurahan, baik melalui kegiatan simpan pinjam, pengembangan usaha mikro anggota,

maupun penguatan jejaring ekonomi lokal. Potensi ini sejalan dengan karakteristik wilayah Kelurahan Semarang Barat yang memiliki dinamika ekonomi masyarakat yang cukup beragam dan peluang pengembangan usaha berbasis kebutuhan lokal.

Meskipun demikian, pada tahap awal operasional, KKMP di Kelurahan Semarang Barat masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan yang menghambat optimalisasi perannya. Permasalahan yang dihadapi antara lain belum optimalnya struktur organisasi dan pembagian tugas pengurus, lemahnya sistem administrasi dan pencatatan keanggotaan, rendahnya akuntabilitas dan transparansi keuangan, serta keterbatasan kapasitas pengurus dalam merencanakan dan mengelola unit usaha koperasi. Selain itu, literasi koperasi di kalangan anggota masih relatif rendah, sehingga partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan usaha koperasi belum optimal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi, khususnya koperasi tingkat lokal, sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya. Koperasi dengan tata kelola yang baik, sistem administrasi yang rapi, serta pengurus yang kompeten cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan (Cornforth, 2014). Sebaliknya, koperasi yang lemah secara kelembagaan berisiko mengalami stagnasi bahkan kegagalan usaha.

Dalam konteks tersebut, fasilitasi dan pendampingan kelembagaan menjadi pendekatan yang sangat relevan untuk memperkuat koperasi yang masih berada pada tahap awal pengembangan. Fasilitasi mencakup dukungan kebijakan, penguatan regulasi internal, serta penyediaan sarana pendukung kelembagaan. Sementara itu, pendampingan lebih menekankan pada proses pembinaan, bimbingan, dan penguatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi secara berkelanjutan (Novitasari et al., 2025). Melalui pendampingan, koperasi tidak hanya dibantu dalam aspek teknis, tetapi juga didorong untuk membangun budaya organisasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan fokus pada pendampingan kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat dirancang sebagai upaya konkret untuk menjawab permasalahan tersebut. Kegiatan ini bertujuan memberikan fasilitasi dan pendampingan yang terintegrasi melalui pelatihan manajerial, penguatan struktur organisasi, pembenahan sistem administrasi dan keuangan, serta penyusunan strategi pengembangan unit usaha koperasi. Pendekatan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa proses pendampingan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil koperasi.

Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan KKMP di Kelurahan Semarang Barat mampu memperkuat fondasi kelembagaannya sehingga dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Lebih jauh, penguatan kelembagaan KKMP diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota, penguatan ekonomi lokal, serta mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang memiliki karakteristik unik dibandingkan badan usaha lainnya. Keunikan tersebut terletak pada orientasi koperasi yang tidak semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan, melainkan pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha secara kolektif dan demokratis. International Cooperative Alliance (ICA) mendefinisikan koperasi sebagai asosiasi otonom dari orang-orang yang secara sukarela bergabung untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis (ICA, 2025).

Dalam konteks Indonesia, koperasi memiliki landasan filosofis dan konstitusional yang kuat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan ini menempatkan koperasi sebagai wujud konkret dari demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan, di mana kepentingan bersama menjadi orientasi utama dalam kegiatan ekonomi (Kurniawan & Haryono, 2023)).

Prinsip-prinsip koperasi yang meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan pelatihan, kerja sama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas menjadi fondasi normatif yang membedakan koperasi dari badan usaha kapitalistik. Prinsip-prinsip ini menuntut adanya tata kelola kelembagaan yang kuat agar koperasi mampu berfungsi secara efektif dan berkelanjutan (Johnston Birchall, 2011).

Namun, implementasi prinsip koperasi dalam praktik sering kali menghadapi tantangan, terutama pada koperasi yang baru dibentuk di tingkat desa dan kelurahan. Banyak koperasi yang secara formal memenuhi persyaratan pendirian, tetapi secara substantif belum mampu menerapkan prinsip-prinsip koperasi dalam tata kelola dan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan koperasi menjadi prasyarat utama agar koperasi dapat menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi rakyat secara optimal.

Kelembagaan koperasi merujuk pada seperangkat aturan formal dan informal yang mengatur struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, pembagian peran dan tanggung jawab, serta sistem pengelolaan sumber daya dalam koperasi. Tata kelola koperasi (cooperative governance) yang baik ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi anggota, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip koperasi (Cornforth, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola kelembagaan merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kinerja koperasi di berbagai negara berkembang. Koperasi yang tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, sistem administrasi yang rapi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan cenderung mengalami stagnasi bahkan

kegagalan usaha (Wanyama, 2015). Sebaliknya, koperasi dengan tata kelola yang baik memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi.

Dalam konteks koperasi kelurahan, tantangan tata kelola menjadi semakin kompleks karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya literasi organisasi di kalangan pengurus dan anggota. Banyak pengurus koperasi yang dipilih berdasarkan kedekatan sosial, bukan kompetensi manajerial, sehingga pengelolaan koperasi sering kali dilakukan secara informal dan kurang profesional (Mulyana et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan koperasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan proses pembelajaran dan pendampingan yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan *institutional theory* yang menekankan bahwa perubahan kelembagaan memerlukan internalisasi norma, nilai, dan praktik organisasi secara bertahap (Tolbert & Zucker, 1996).

Fasilitasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan koperasi, khususnya pada tahap awal pembentukan. Fasilitasi mencakup dukungan kebijakan, penyediaan regulasi yang kondusif, bantuan teknis, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan koperasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, fasilitasi koperasi sering kali diwujudkan melalui pembinaan, pelatihan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat (Astutik et al., 2025). Peran fasilitasi pemerintah menjadi sangat penting karena koperasi tingkat desa dan kelurahan umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari sisi modal, pengetahuan, maupun jejaring usaha. Tanpa fasilitasi yang memadai, koperasi berisiko tidak mampu berkembang dan hanya menjadi entitas formal tanpa aktivitas ekonomi yang signifikan (Sari & Nidar, 2025).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa dukungan dan program fasilitasi pemerintah/lembaga terkait (seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia) memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kapasitas manajerial pengurus koperasi serta kinerja operasional koperasi secara keseluruhan. Pelatihan dan pendidikan manajerial telah terbukti meningkatkan kompetensi pengurus sehingga memperbaiki pengelolaan koperasi dan membantu koperasi mencapai tujuan pemberdayaan ekonominya (Martini et al., 2017).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa pengembangan koperasi yang berkelanjutan membutuhkan pendampingan dan pembinaan kelembagaan yang kontinu, termasuk pelatihan manajerial, strategi pengembangan unit usaha, dan partisipasi aktif anggota dalam proses perencanaan dan evaluasi program pemberdayaan. Pendekatan ini terbukti memperkuat struktur organisasi sekaligus meningkatkan daya saing koperasi secara berkelanjutan. *Studi tentang praktik manajemen koperasi berkelanjutan* menegaskan peran latihan dan manajemen yang berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas operasional dan pencapaian tujuan koperasi (Attolba-Aquino & Castañeda, 2025).

Pendampingan koperasi mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan kapasitas manajerial pengurus, pembenahan sistem administrasi dan operasional, hingga pembentukan struktur organisasi serta penyusunan standar operasional yang mendukung manajemen koperasi secara profesional. Studi empiris menemukan bahwa pendampingan tata kelola operasional koperasi membantu koperasi meningkatkan kinerjanya dan mengoptimalkan sistem administrasi, sementara pendidikan dan pelatihan manajerial terbukti meningkatkan kompetensi pengurus dalam menjalankan tugas pengelolaan kelembagaan (Susanto & Noviantoro, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas melalui program pelatihan dan peningkatan pengetahuan bagi pengurus koperasi secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kinerja operasional koperasi. Program peningkatan kapasitas semacam ini mendorong pengurus memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan organisasi, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan dan kinerja koperasi secara keseluruhan (Titin et al., 2024).

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan koperasi di wilayahnya. Pemerintah daerah bertindak tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator melalui penyediaan dukungan kebijakan, program pembinaan, serta penghubungan koperasi dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha lainnya. Peran-peran ini telah ditunjukkan dalam studi empiris tentang pemberdayaan ekonomi lokal oleh pemerintah daerah (Aditya et al., 2025). Sebagai katalisator, pemerintah kelurahan diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem ekonomi lokal yang mendukung perkembangan koperasi. Ekosistem ini mencakup jejaring usaha, akses pasar, serta kolaborasi antar pelaku ekonomi lokal. Dalam hal ini, koperasi tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi kelurahan (Nugraha & Intan, 2024).

Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai program nasional memiliki tantangan yang serupa dengan koperasi-koperasi lokal lainnya, terutama pada tahap awal pembentukan. Oleh karena itu, pendekatan pendampingan kelembagaan menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu berfungsi secara substantif sebagai lembaga ekonomi masyarakat. Pendampingan kelembagaan memungkinkan koperasi membangun fondasi organisasi yang kuat, meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota, serta merumuskan strategi pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Dalam jangka panjang, pendampingan diharapkan mampu mendorong koperasi menjadi lembaga yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) yang menempatkan pengurus dan anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai subjek utama dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai paling sesuai untuk kegiatan penguatan kelembagaan koperasi, yang menuntut keterlibatan aktif, rasa memiliki, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan koperasi (Chambers, 1994).

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pendekatan partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai metode teknis pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat sasaran terlibat secara langsung dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, serta evaluasi hasil kegiatan. Dengan demikian, hasil kegiatan diharapkan tidak bersifat top-down, melainkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan potensi lokal koperasi (Riswan & Bushra Beegom, 2021).

Desain kegiatan PKM ini bersifat deskriptif-implementatif, yaitu memadukan kegiatan analisis kondisi awal koperasi dengan implementasi berbagai metode pembelajaran dan pendampingan kelembagaan. Desain ini memungkinkan tim pengabdian tidak hanya memberikan materi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses penguatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Subjek dan Lokasi Kegiatan

Subjek kegiatan PKM ini adalah pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat, Kota Semarang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa KKMP merupakan koperasi yang relatif baru dibentuk sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan.

Karakteristik peserta kegiatan yang beragam, baik dari sisi latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, maupun jenis usaha yang dijalankan, menjadi pertimbangan penting dalam perancangan metode pelaksanaan. Oleh karena itu, metode yang digunakan disesuaikan agar inklusif, mudah dipahami, dan aplikatif, sehingga dapat menjangkau seluruh peserta secara efektif.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu: (1) tahap persiapan dan identifikasi kebutuhan, (2) tahap pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan, serta (3) tahap evaluasi dan refleksi kegiatan.

Tahap Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pengabdian dan pihak kelurahan serta pengurus KKMP. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi awal mengenai kondisi koperasi, meliputi struktur organisasi, sistem administrasi, jenis kegiatan usaha, serta permasalahan yang dihadapi.

Identifikasi kebutuhan dilakukan secara partisipatif melalui diskusi awal dan observasi lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi dan metode pendampingan yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan koperasi. Tahap ini sejalan dengan prinsip *needs-based approach* dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Unterm, 2009).

Metode Ceramah Interaktif

Metode ceramah interaktif digunakan sebagai sarana penyampaian materi konseptual terkait prinsip koperasi, tata kelola kelembagaan, manajemen koperasi, serta peran dan tanggung jawab pengurus dan anggota. Ceramah disampaikan dengan pendekatan dialogis, di mana peserta tidak hanya berperan sebagai pendengar pasif, tetapi juga didorong untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman.

Pemilihan metode ceramah interaktif didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar peserta masih memerlukan penguatan pemahaman dasar mengenai konsep dan prinsip koperasi. Menurut Knowles (2007), pembelajaran orang dewasa akan lebih efektif apabila materi disampaikan secara kontekstual dan melibatkan pengalaman peserta sebagai sumber belajar.

Dalam kegiatan ini, ceramah interaktif diperkaya dengan studi kasus sederhana yang relevan dengan kondisi KKMP, sehingga peserta dapat mengaitkan materi dengan praktik pengelolaan koperasi sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus kesadaran peserta akan pentingnya tata kelola koperasi yang baik.

Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) digunakan sebagai metode utama untuk menggali permasalahan internal koperasi, memetakan potensi dan peluang usaha, serta merumuskan rencana kerja koperasi secara partisipatif. FGD memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan antar peserta dan mendorong munculnya kesepakatan bersama mengenai arah pengembangan koperasi (Krueger & Casey, 2015).

Dalam pelaksanaan FGD, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Setiap kelompok difasilitasi untuk mendiskusikan topik tertentu,

seperti permasalahan kelembagaan, kendala administrasi dan keuangan, serta peluang pengembangan unit usaha. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan dan dibahas bersama dalam forum pleno.

Penggunaan FGD dalam kegiatan PKM ini bertujuan untuk memperkuat rasa kepemilikan (sense of ownership) peserta terhadap hasil kegiatan. Dengan terlibat langsung dalam proses perumusan rencana kerja, peserta diharapkan memiliki komitmen yang lebih kuat untuk mengimplementasikan hasil kesepakatan dalam praktik pengelolaan koperasi.

Problem Based Learning (PBL)

Problem Based Learning (PBL) diterapkan untuk mendorong peserta menganalisis permasalahan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan usaha anggota koperasi, seperti pemasaran produk, pengemasan, penentuan harga, dan akses permodalan. PBL menempatkan masalah sebagai titik awal pembelajaran, sehingga peserta didorong untuk berpikir kritis dan solutif (Hmelo-Silver, 2004)

Dalam kegiatan ini, peserta diminta mengidentifikasi permasalahan usaha yang paling relevan dengan kondisi mereka. Selanjutnya, peserta difasilitasi untuk merumuskan alternatif solusi dan inovasi usaha yang realistis dan dapat diimplementasikan dalam konteks koperasi kelurahan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *experiential learning* yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung (Kolb et al., 2017).

Penerapan PBL diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan analisis peserta, tetapi juga mendorong munculnya inovasi usaha koperasi yang berbasis pada kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya diperkuat dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari sisi pengembangan usaha produktif.

Simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilakukan dengan metode *role-play* untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam koperasi. Dalam simulasi ini, peserta diberi peran sebagai pengurus, pengawas, ketua rapat, dan anggota koperasi.

Simulasi RAT mencakup penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, pembahasan Sisa Hasil Usaha (SHU), serta proses pengambilan keputusan secara demokratis. Metode simulasi dipilih karena dinilai efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi dan hak serta kewajiban anggota (Chernikova et al., 2020).

Melalui simulasi RAT, peserta diharapkan memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota dalam pengelolaan koperasi. Selain itu, simulasi ini juga menjadi sarana

pembelajaran praktis bagi pengurus dalam mempersiapkan dan melaksanakan RAT secara tertib dan sesuai prinsip koperasi.

Evaluasi dan Refleksi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui diskusi reflektif dan umpan balik dari peserta. Evaluasi difokuskan pada tingkat pemahaman peserta, relevansi materi, serta manfaat kegiatan bagi penguatan kelembagaan koperasi. Pendekatan evaluasi partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa penilaian kegiatan mencerminkan perspektif peserta (Montano et al., 2025). Hasil evaluasi menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut dan pendampingan lanjutan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak berhenti pada satu kali pelaksanaan, tetapi menjadi bagian dari proses penguatan kelembagaan koperasi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pendampingan kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat menunjukkan adanya perubahan positif pada berbagai aspek kelembagaan koperasi. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dan prinsip koperasi, tetapi juga pada sikap, kesiapan, dan komitmen pengurus serta anggota dalam mengelola koperasi secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, pengelolaan koperasi masih bersifat administratif dan belum didukung oleh perencanaan yang sistematis. Struktur organisasi telah terbentuk, namun pembagian tugas dan fungsi belum berjalan optimal. Selain itu, mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari prinsip demokrasi ekonomi koperasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Astutik et al. (2025) yang menyatakan bahwa banyak koperasi tingkat lokal masih menghadapi persoalan kelembagaan akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan minimnya pendampingan.

Melalui rangkaian kegiatan PKM yang meliputi ceramah interaktif, Focus Group Discussion (FGD), *Problem Based Learning* (PBL), dan simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), koperasi mulai menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam mengelola organisasi dan merencanakan pengembangan usaha. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan PKM mampu mendorong proses pembelajaran kolektif dan internalisasi nilai-nilai koperasi di kalangan pengurus dan anggota.

Salah satu hasil utama dari kegiatan pendampingan kelembagaan ini adalah meningkatnya pemahaman pengurus dan anggota koperasi mengenai prinsip-prinsip dasar koperasi, peran dan tanggung jawab masing-masing unsur organisasi, serta pentingnya tata kelola yang transparan dan

akuntabel. Melalui metode ceramah interaktif, peserta memperoleh pemahaman konseptual mengenai koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang dikelola secara demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Peningkatan pemahaman ini tercermin dari kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali fungsi pengurus, pengawas, dan anggota, serta pentingnya pemisahan peran antara pengelola dan pengawas koperasi. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kualitas tata kelola kelembagaan, bukan semata-mata pada besarnya modal atau jumlah anggota. Temuan ini sejalan dengan (Cornforth, 2014) yang menekankan bahwa tata kelola yang baik merupakan prasyarat utama keberlanjutan koperasi.

Dari sisi kapasitas sumber daya manusia, kegiatan pendampingan juga mendorong peningkatan kepercayaan diri pengurus dalam menjalankan fungsi manajerial. Pengurus yang sebelumnya ragu dalam menyusun administrasi dan laporan mulai menunjukkan kesiapan untuk menerapkan sistem pencatatan yang lebih tertib dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan kelembagaan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesiapan psikologis dan sikap profesional pengurus koperasi.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan bahwa sebelum kegiatan pendampingan, KKMP belum memiliki rencana kerja yang tersusun secara sistematis dan disepakati bersama oleh seluruh unsur koperasi. Kegiatan operasional koperasi berjalan secara insidental dan belum didasarkan pada perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah. Kondisi ini menyebabkan koperasi sulit mengukur kinerja dan arah pengembangannya.

Melalui FGD, pengurus dan anggota difasilitasi untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi koperasi, seperti lemahnya administrasi keanggotaan, belum optimalnya pelayanan kepada anggota, serta keterbatasan unit usaha yang dijalankan. Selanjutnya, peserta secara partisipatif merumuskan rencana kerja sederhana yang mencakup penguatan administrasi keanggotaan, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Kelurahan Semarang Barat.

Proses FGD mendorong terjadinya dialog terbuka dan pertukaran pandangan antar peserta, sehingga rencana kerja yang dihasilkan bukan merupakan keputusan sepihak pengurus, melainkan hasil kesepakatan bersama. Hal ini penting dalam konteks koperasi, karena partisipasi anggota dalam perencanaan merupakan salah satu prinsip utama koperasi (ICA, 2025). Temuan ini memperkuat pandangan (Krueger & Casey, 2015) bahwa FGD merupakan metode efektif untuk membangun konsensus dan rasa kepemilikan dalam organisasi berbasis komunitas.

Pada aspek pengembangan usaha, penerapan Problem Based Learning (PBL) mendorong peserta untuk menganalisis permasalahan nyata yang dihadapi oleh anggota koperasi dalam

menjalankan usaha. Permasalahan yang diidentifikasi antara lain keterbatasan pemasaran produk, pengemasan yang kurang menarik, serta keterbatasan akses permodalan.



Gambar 1 Kegiatan Penyampaian Materi

Melalui diskusi berbasis masalah, peserta didorong untuk merumuskan solusi dan inovasi usaha yang realistis dan sesuai dengan kondisi koperasi. Hasil PBL menunjukkan munculnya ide-ide pengembangan unit usaha koperasi, seperti penguatan unit simpan pinjam berbasis kebutuhan anggota dan pengembangan usaha perdagangan kebutuhan pokok yang memiliki permintaan relatif stabil di tingkat kelurahan.

Pendekatan PBL terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah peserta. Hal ini sejalan dengan temuan (Hmelo-Silver, 2004) dan (Kolb et al., 2017) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah dan pengalaman langsung mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas peserta. Dalam konteks PKM ini, PBL tidak hanya berfungsi sebagai metode pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana mendorong inovasi usaha koperasi.

Simulasi Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman peserta mengenai mekanisme demokrasi ekonomi dalam koperasi. Melalui metode role-play, peserta diberi peran sebagai pengurus, pengawas, dan anggota, sehingga dapat merasakan secara langsung proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban dalam koperasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya RAT sebagai forum tertinggi dalam koperasi yang menjadi sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.

Peserta juga memahami mekanisme pembahasan laporan keuangan, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), serta pengambilan keputusan secara musyawarah. Temuan ini sejalan dengan (Choudhary & Jalan, 2022) yang menyatakan bahwa metode simulasi efektif untuk meningkatkan pemahaman praktis terhadap proses organisasi yang kompleks. Simulasi RAT juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran pengurus akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membangun komitmen pengurus untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam praktik pengelolaan koperasi sehari-hari.

Pembahasan hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan kelembagaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesiapan KKMP untuk berkembang secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan koperasi di tingkat kelurahan. Hasil ini konsisten dengan temuan (Wanyama, 2015) dan (Masyhuri, 2024) yang menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam pengembangan koperasi lokal.

Dalam konteks Koperasi Kelurahan Merah Putih, pendampingan kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi bagi pengembangan koperasi jangka panjang. Dengan meningkatnya pemahaman, kapasitas, dan komitmen pengurus serta anggota, KKMP memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi koperasi yang sehat, akuntabel, dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Semarang Barat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pendampingan kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Semarang Barat, Kota Semarang, memberikan gambaran empiris bahwa koperasi yang dibentuk dalam kerangka kebijakan nasional masih menghadapi berbagai tantangan kelembagaan yang bersifat mendasar. Tantangan tersebut meliputi lemahnya tata kelola organisasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, administrasi keanggotaan yang belum tertata secara sistematis, rendahnya akuntabilitas dan transparansi keuangan, serta keterbatasan kemampuan koperasi dalam mengembangkan unit usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa fasilitasi dan pendampingan kelembagaan yang dilakukan secara terstruktur dan partisipatif mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman, sikap, dan kesiapan pengurus serta anggota koperasi. Melalui ceramah interaktif, Focus Group Discussion (FGD), Problem Based Learning (PBL), dan simulasi Rapat Anggota

Tahunan (RAT), pengurus dan anggota KKMP memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip koperasi, peran dan tanggung jawab organisasi, serta pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

Selain peningkatan pemahaman konseptual, kegiatan PKM ini juga mendorong terjadinya perubahan pada aspek praksis pengelolaan koperasi. Hal ini tercermin dari mulai tersusunnya rencana kerja koperasi secara partisipatif, meningkatnya kesadaran pengurus akan pentingnya administrasi dan pencatatan keuangan yang tertib, serta munculnya gagasan pengembangan unit usaha yang lebih relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal masyarakat Kelurahan Semarang Barat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa penguatan kelembagaan koperasi tidak dapat dicapai hanya melalui pembentukan struktur formal, tetapi memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan dan kontekstual (Mufid & Ardianti, 2025; Wanyama, 2015).

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan kelembagaan ini dapat dipandang sebagai langkah awal yang strategis dalam membangun fondasi kelembagaan KKMP agar mampu berkembang menjadi koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, hasil yang dicapai masih bersifat awal dan memerlukan tindak lanjut yang konsisten agar perubahan yang telah dimulai dapat terinternalisasi secara permanen dalam praktik pengelolaan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M., Atmaja, B., & Hamid, H. (2025). *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pelaksanaan Program Pendampingan , Pelatihan , Permodalan , dan Pemasaran Usaha Mikro di Kota Semarang*. 4(1), 814–823.
- Astutik, S. D., Kelembagaan, P., & Ekonomi, K. (2025). *Strategi Dinas Koperasi dalam Pembinaan Kelembagaan Koperasi Mewujudkan Kemandirian Ekonomi*. 3(1), 1–9.
- Attolba-Aquino, R. A. M. B., & Castañeda, M. O. B. (2025). *Implementation and Effectiveness of Sustainable Cooperative Management Practices*. 3(6), 488–501.
- Cecilia, S., Murayama, T., Nishikizawa, S., & Suwanteep, K. (2024). Stakeholder evaluation of sustainability in a community - led wastewater treatment facility in Jakarta , Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, 26(4), 8497–8523. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03056-9>
- Chambers, R. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience **. 22(9), 1253–1268.
- Chernikova, O., Heitzmann, N., Stadler, M., Holzberger, D., Seidel, T., & Fischer, F. (2020). *Simulation-Based Learning in Higher Education: A Meta-Analysis*. 90(4), 499–541. <https://doi.org/10.3102/0034654320933544>
- Choudhary, P., & Jalan, V. (2022). *Enhancing Process Comprehension through Simulation-Based Learning*. 919–924. <https://doi.org/10.48175/IJARSCT-14400R>

- Cornforth, C. (2014). Understanding and combating mission drift in social enterprises. *Social Enterprise Journal*, 10, 3–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/SEJ-09-2013-0036>
- Dongre, Y., Indira, M., Nair, D. S., WadkaR, S. K., Sano, Y., Barhoumeh, S., Dzhakshylykova, M., Parasuraman, B., Aicha, E., Paudel, G. P., Villamin, R. M., Chand, R., & Cho, S. J. and D. S. (2024). *Promoting Partnerships between the State and Cooperatives : Comparative Perspectives from Select Countries of the Asia-Pacific Region Presented at the 11th Asia-Pacific Cooperative Ministers ' Conference*.
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). *Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?* 16, 235–266.
- Hutapea, J. G., S, F. R., & Napitupulu, D. (2024). *Jurnal Prisma Hukum*. 8(10), 72–78.
- ICA. (2025). *What is a cooperative?*
- Ilmiah, J. R., Irfan, M., Wardana, S., & Mursalin, I. A. (2025). *SENTRI : Analisis Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Bengkulu*. 4(9), 1873–1890.
- Johnston Birchall. (2011). *No Title People-centred businesses: Cooperatives, mutuals and the idea of membership*.
- Knowles, M. S. (2107). *Andragogy: Adult Learning Theory in Perspective*.
- Kolb, A. Y., Kolb, D. A., Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2017). *Experiential Learning & Teaching in Higher Education Experiential Learning Theory as a Guide for Experiential Educators in Higher Education Experiential Learning Theory as a Guide for Experiential Educators in Higher Education*. 1(1), 6–44.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *No Title*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119171386.ch20>.
- Kurniawan, R. Y., & Haryono, A. (2023). *Cooperatives as The Pillars of The Pancasila Economic Driving Force*. 11(1), 21–27.
- Martini, I. A. O., Lasmi, N. W., Jaya, N., & Sutrisni, N. K. E. (2017). *Improving Cooperative Performance through Human Resource Development Efforts*. 1(3), 49–58.
- Masyhuri, M. A. (2024). *The Urgency of Cooperative Development in Rural Areas of Indonesia*. 4(4), 266–276. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.636>
- Montano, L. J., Font, X., Elsenbroich, C., & Alector, M. (2025). Co-learning through participatory evaluation: an example using Theory of Change in a large-scale EU-funded tourism intervention. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(4), 653–672. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2227781>
- Mufid, M., & Ardianti, A. D. (2025). *Journal of Research Applications in. c*, 101–108.
- Mulyana, I., Arr, T., Indonesia, U. K., & Digital, U. T. (2025). *Analisis Masalah Kelembagaan dan Manajerial Koperasi di Indonesia Berdasarkan Studi Literatur*. 1(2), 293–308.

- Novitasari, R., Sholihah, Q., & Prasetyo, K. (2025). *The Role of Policy Entrepreneurs in Encouraging Partnership and Strengthening MSME Supply Chains in Indonesia*. 121–141.
- Nugraha, M., & Intan, L. N. (2024). *Jurnal Ilmiah Pemerintahan Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. 12, 121–137.
- Riswan, M., & Bushra Beegom, R. K. (2021). *CHAPTER 11*. 5, 136–146.
- Sari, I. M., & Nidar, S. R. (2025). *Enhancing Member Welfare in*. 15(04), 805–827. <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i4.41780>
- Suleman, D. (2022). *Pengembangan Usaha Koperasi Agar dapat Mengenal Pasar dan Pesaing*. 2(2), 265–271. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.966>
- Sunaryo, K., K, S. H. E., & Kusumawardhani, I. (2024). *Implementation of Good Corporate Governance in Cooperatives : A Study in Yogyakarta Indonesia*. 1(04), 177–190.
- Suryaningrum, D. A., P, M. L., & Utami, E. Y. (2024). *Analisis Kualitas Layanan Koperasi , Dukungan Pemerintah Daerah , Keterlibatan Masyarakat dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Yogyakarta*. 2(02), 157–167.
- Susanto, Y., & Noviantoro, D. (2022). *MATAPPA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi*. 5, 184–189.
- Titin, Ghofur, A., & Rusmawati, Y. (2024). *The Effect of Capacity Building with Increased Knowledge and Skills on Cooperative Chairmen ' s Performance Through Personal*. Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-244-6>
- Tolbert, P. S., & Zucker, L. G. (1996). *DigitalCommons @ ILR The Institutionalization of Institutional Theory The Institutionalization of Institutional Theory*.
- Unterm. (2009). *Community development". UNTERM*. Archived from the original on 14 July 2014. Retrieved 7 July 2014. July 2014.
- Wanyama. (2015). *Cooperatives and the Sustainable Development Goals Resilience in a downturn : The power of financial cooperatives*.